

JURNAL

KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN KPK SEBAGAI

PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG

BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI



Diajukan oleh :

KOMANG SINTA PRABAWATI

NPM : 090510066

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN KPK SEBAGAI
PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan Oleh :

KOMANG SINTA PRABAWATI

NPM

:090510066

Progam Studi

:Ilmu Hukum

Progam Kekhususan

:Peradilan Penyelesaian Sengketa Hukum

Dosen Pembimbing

G. Widiartana SH, M.Hum.

tanda tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. L. LM

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN KPK SEBAGAI
PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

KomangSintaPrabawati, G Widiartana

JurusanIlmuHukum

FakultasHukumUniversitasAtma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

Money laundry is a term of money laundering practice of dirty money which originated from illegal practice like corruptions, bribery, drugs selling, and other illegal practice. This practice is usually a lot to do with money from corruptions in order to hide the money from corruption practices. Corruptions must be fight against because it caused financial loss to the government. The authority of corruption provisions are given to KPK (Corruptions Eradication Commissions).

KPK is an institution who authorized to do investigation and pursuit in money laundry activities from corruptions practices. In that case, there are problems in the jurisdiction ground of KPK to do investigation dan pursuit the result of money laundry. The research in this paper is using normative law. The data source is coming from secondary data from primary body corporation and secondary body corporation which analyzed qualitatively. The investigation side has been specifically arranged in

Corruption Eradication Penal Law, but from the pursuit side there is no clear jurisdiction ground. It is necessary to make amendment of the Money Laundry Penal Law, especially in the general prosecutor paragraph. It will aim to make simply to do investigation and pursuit to fight against money laundry activity from corruption practice.

KEY WORDS: Money Laundry, Corruption, KPK, Authority

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang sudah banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui istilah *money laundry* (pencucian uang). Pencucian uang merupakan praktek pencucian uang panas dan uang kotor. Uang kotor yang diistilahkan *dirty laundry*, uang yang berasal dari praktek-praktek illegal seperti Korupsi, penyelundupan, penjualan obat-obat terlarang, penyuapandan praktek-praktek yang kotor lainnya. Praktek –praktek *money laundry* ini sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari hasil korupsi. Praktek pencucian uang ini mungkin hanya sebuah cara untuk menyembunyikan hasil dari tindakan korupsi.

Korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Di Negara Indonesia banyak terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat kelas atas, atau oleh petinggi negara. Kejahatan korupsi yang ditinjau lanjut dengan kejahatan pencucian uang selama ini dapat digolongkan sebagai kejahatan yang cukup rapi. Mengingat pelaku tindak pidana

pencucian uang umumnya berasal dari kalangan masyarakat yang berintelektual tinggi, mempunyai atau memiliki kekuasaan baik sosial, politik dan ekonomi yang cukup mempunyai jaringan yang sangat luas, maka pelaku dengan mudah melakukan secara pintar berbagai kemungkinan yang terjadi.

Di Negara Indonesia banyak terjadikaseskorupsi yang dilakukanolehpejabatkelasatas, atauolehpetingginegara.Kejahatan korupsi yang ditinjaklanjuti dengan kejahatan pencucian uang selama ini dapat digolongkan sebagai kejahatan yang cukup rapi.Untuk memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk sebagai Penyidik dan penuntut umum.

Dalam Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang KPK diberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang.Hal itu secara tegas dinyatakan pada Pasal 74, yaitu : “penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang undang ini”.Begitujugapenjelasan Pasal 74 yang menyatakan “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jendral Bea cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemuka bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak

pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya”.

Kewenangan KPK untuk menuntut memang tidak disebutkan secara tegas sebagaimana kewenangan untuk melakukan penyidikan, meskipun demikian tidak berarti KPK tidak berwenang menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “ Penuntut adalah penuntut umum pada komisi pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Pasal 38 ayat(1) juga ditegaskan tentang apa saja kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu :

“segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 1981 (KUHP), Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kewenangan untuk menuntut tindak pidana pencucian uang ada pada jaksa. Meskipun demikian dalam praktek masih sering terjadi perbedaan pendapat mengenai kewenangan jaksa untuk menuntut tindak pidana pencucian uang tersebut. Hal ini bisa dilihat pada kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai perkara impor daging dengan terdakwa Ahmad Fathonah dimana dalam kasus ini terdapat *dissenting opinion*. Salah satu hakim berpendapat bahwa jaksa penuntut umum pada KPK tidak berwenang

melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh kedua tersangka.

Bertolak dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka peneliti mengambil judul penulisan hukum “KajianYuridisMengenaiKewenangan KPK Sebagai Penyidik dan Penuntut Umum tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi”.

2. RumusanMasalah

Sesuai dengan judul dan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar hukum bagi kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapiKPK untukmelakukanpenyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang?

PEMBAHASAN

KEWENANGAN KPK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Sejarah Singkat Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi

Sesuai dengan judul penulisan mengenai “ Kajian Yuridis Mengenai Kewenangan KPK Sebagai Penyidik dan Penuntutan UmumTindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi”. KPK merupakan salah satu instansi yang dibentuk dengan tujuan untuk memberantas kejahatan korupsi. Dalam hal ini KPK mempunyai kewenangan tertentu untuk melakukan suatu penyidikan dan penuntutan dalam suatu tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri pada bulan

Desember 2003. Gagasan pembentukan KPK diawali oleh TAP MPR No. II Tahun 1998. TAP MPR tersebut mengamanatkan kepada DPR dan pemerintah untuk lebih progresif dalam menciptakan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pembentukan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai Visi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dan Misi Penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi.

B. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi.

Pencucian uang adalah suatu proses perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Beberapa tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang atau tenaga kerja, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan individual, terorisme, penipuan.¹ Pencucian uang atau *money laundering* diartikan juga sebagai suatu proses

¹Sutan Remy Sjahdeni, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Hlm. 12

atau usaha menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut uang kotor (uang haram) yang diubah kedalam bentuk yang sah agar dapat digunakan dengan aman.²

Ketentuan tentang tindak pidana pencucian uang dapat jugaditemukan dalam, Pasal 3 yang menyatakan bahwa “ setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak sebagaimana yang disebutkan dalamPasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00.- (sepuluh milyar rupiah)”. Praktik pencucian uang atau *money laundering* tidak mudah diberantas. Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong maraknya kegiatan pencucian uang yaitu :

- 1) Globalisasi,
- 2) Sangat cepatnya kemajuan teknologi, yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang informasi. Salah satunya kemunculan internet di dunia maya (*cyber space*)
- 3) Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat,
- 4) Makin maraknya elektronik banking yang antar lain diperkenalkannya ATM dan *wire transfer*,
- 5) Merupakan penyebab maraknya praktik pencucian uang adalah munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* dan *e-money*
- 6) Penggunaan secara berlapis pihak pemberi jasa hukum (*lawyer*) untuk melakukan penempatan dana,
- 7) Tidak bersungguh-sungguhnyapemerintah dan perbankan negara sertapenggunaan jasa keuangan lainnya untuk memberantas praktik-praktik pencucian uang
- 8) Belum adanya Undang-Undang Pemberantasan pencucian uang.³

²Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pascasarjana Fakultas Hukum 2003) hlm.1

³Adrian Sutedi SH, MH.2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Aditya Bhakti., hal 40-53

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Korupsi sebagai berikut :

“Penyelewengan atau penggelapan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain”⁴

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Dan dalam pasal 3 menyatakan “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

C. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi.

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2002

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pengertian penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik sebagaimana yang dimaksud diatas adalah menjalankan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.⁵Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan umum” pada Pasal 4 “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi”

Pasal 6 pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur kewenangan KPK secara jelas, yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Melakukan penyidikan, penyidik dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan, Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

⁵Muhamad Yusuf,. 2010, *ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, NLRPhlm547 dan 549

Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai tanggung jawab dalam melakukan tugas dan kewenangan yang ditentukan pada Pasal 20 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 yaitu :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya yang menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
2. Pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan cara :
 - a. Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya
 - b. Menerbitkan laporan dan,
 - c. Membuka akses informasi

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut perkara tindak pidana pencucian uang akan berkaitan dengan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi”

Dengan menerima tuntutan dari Jaksa KPK terhadap perkara korupsi dan TPPU, meski tidak diatur secara spesifik kewenangan menuntut KPK, Pengadilan Tipikor dilarang menolak perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Dalam pasal tersebut pengadilan tindak pidana korupsi sudah mengakui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntut perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dilihat dari satu contoh kasus WA Ode Nurhayanti ketika KPK melakukan penuntutan kepada Badan Anggaran DPR. Dalam kasus ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang menuntut perkara pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi.⁶

Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

D. Kendala yang dihadapi KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam suatu proses penyelidikan dan penuntutan KPK menemukan beberapa kendala yang dihadapi sehingga menghambat proses penyelidikan tersebut, yaitu :

⁶<http://nasional.kompas.com/read/2013/07/27/1859450/KPK.dan.Pencucian.Uang>

- a. Ketentuan mengenai kewenangan KPK sebagai penyidik dan penuntutan umum yang belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut sebagai salah satu kendala atau penghambat KPK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi.
- b. Adanya tekanan-tekanan dari pendukung tersangka berupa demonstrasi ataupun ancaman terhadap pegawai dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adanya kerancuan mengenai masalah pembuktian tindak pidana asal dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa bukan termasuk hasil dari tindak pidana. Hal ini merupakan salah satu kekhususan tindak pidana pencucian uang dibandingkan dengan peraturan KUHP dimana terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, namun pembuktian terbalik dengan tindak pidana pencucian uang hanya dapat dilakukan oleh terdakwa pada tingkat pengadilan buikan pad penyelidikan dan penuntutan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan pada BAB sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntut Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi adalah :

- a. Pasal 74 dan 75 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
 - b. Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 - c. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat disimpulkan beberapakendalayaitu :
- a. Ketentuan mengenai kewenangan KPK sebagai penyidik dan penuntutan umum yang belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - b. Adanya tekanan-tekanan dari pendukung tersangka berupa demonstrasi ataupun ancaman terhadap pegawai dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 - c. Adanya kerancuan mengenai masalah pembuktian tindak pidana asal dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa bukan termasuk hasil dari tindak pidana.

Saran

Agar Undang-Undang mengena iPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perlu di tinjau dan diperbaharui kembali .Mengatur lebih spesifik dan lebih

ditekankan mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Hal tersebut diperlukan guna untuk memperlancar penyelesaian kasus tindak pidana pencucian uang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Aditya Bhakti, Bandung

Muhamad Yusuf, 2010, *ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, NLRP, Jakarta

Sutan Remy Sjahdeni, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2002

<http://nasional.kompas.com/read/2013/07/27/1859450/KPK.dan.Pencucian.Uang>